

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

A.1. Konsep Historiografi

Historiografi dari sudut etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *historia* dan *graphein*. *Historia* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan sedangkan *graphein* yang berarti gambaran, lukisan atau uraian. Dengan demikian historiografi dapat diartikan sebagai suatu uraian atau gambaran tentang suatu hasil penelitian.

Historiografi disebut sebagai sejarah dari sejarahnya atau sejarah penulisan sejarah. Historiografi sering disebut sebagai rekonstruksi yang imajinatif, kemungkinan melalui masa lampau sebagai pengertian yang untuk mengerti dan memunculkan kembali. (Ramadani, 2008, Universitas Negeri Yogyakarta).

Historiografi adalah perkembangan penulisan sejarah dari masa ke masa. Dalam penulisan sebuah historiografi di dalamnya memuat mengenai teori dan metodologi sejarah. Historiografi dapat diartikan sebagai sejarah penulisan sejarah untuk merekonstruksi masa lalu. Dalam historiografi terdapat pemahaman atau refleksi kultural sejarawan tentang masa lalu sehingga mengandung arti subjektif. (Anwinata.blogspot.com/2009/03 Historiografi).

Penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana menkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi), dan diinterpretasi, sesuai dengan tugas penelitian sejarah untuk merekonstruksi sejarah masa lampau, maka rekonstruksi itu hanya akan menjadi eksis apabila hasil-hasil penelitian tersebut ditulis (historiografi). Penulisan sejarah tidak semudah dalam penulisan ilmiah lainnya, tidak cukup dengan menghadirkan informasi dan argumentasi. Penulis sejarah, walaupun terikat pada aturan-aturan logika dan bukti-bukti empirik, tidak boleh dilupakan bahwa penulisan sejarah adalah juga karya sastra yang menuntut kejelasan struktur dan gaya bahasa, eksentiasi serta nada retorika tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan historiografi adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang berisi tentang peristiwa atau kisah mengenai metode sejarah, pendekatan perspektif atau menerangkan peristiwa dari sudut pandang serta penyajian dalam bentuk model penulisan sejarah. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk dan sebagainya. Dengan kata lain tinjauan landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau.

A.2. Konsep Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. (Oemar Hamalik, 1994:57)

Rumusan teori pembelajaran:

1. Mengajar adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik di sekolah, konsep-konsep yang terkandung di dalamnya: (1) pembelajaran merupakan persiapan di masa depan, (2) pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan, (3) tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan pengetahuan
2. Mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada peserta didik melalui lembaga pendidikan sekolah, konsep-konsep yang terkandung di dalamnya: (1) Pembelajaran bertujuan membentuk manusia berbudaya, (2) pembelajaran berarti suatu proses pewarisan, (3) bahan pembelajaran bersumber dari kebudayaan, (4) peserta didik sebagai generasi muda ahli waris kebudayaan
3. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik, implikasi dari pengertian tersebut adalah: (1) pendidikan bertujuan mengembangkan atau mengubah tingkah laku peserta didik, (2) kegiatan pembelajaran berupa pengorganisasian lingkungan, (3) peserta didik sebagai suatu organisme yang hidup
4. Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik, implikasi dari pengertian ini adalah: (1) tujuan pembelajaran adalah pembentukan warga negara yang baik yaitu warga Negara

yang dapat bekerja untuk masyarakat, (2) pembelajaran berlangsung dalam suasana kerja dimana peserta didik mendapat latihan dan pengalaman praktis, (3) peserta didik sebagai calon warga negara yang memiliki potensi untuk bekerja, (4) guru sebagai pimpinan dan pembimbing bengkel kerja yaitu guru harus mempunyai keterampilan khusus dan menyediakan proyek-proyek kerja yang menciptakan berbagai kesibukan yang bermakna

5. Pembelajaran adalah suatu proses membantu peserta didik menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari, implikasi dari pengertian ini: (1) tujuan pembelajaran adalah mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat, (2) kegiatan pembelajaran berlangsung dalam hubungan sekolah dan masyarakat maksudnya adalah masyarakat dinyatakan sebagai laboratorium belajar, sumber-sumber masyarakat tak pernah habis sebagai sumber belajar, (3) peserta didik belajar secara aktif.

Segala usaha yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pengajaran atau aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, diluar diri peserta didik (lingkungan) yang melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung disebut pembelajaran.

Dengan peranan sumber-sumber belajar seperti peristiwa sejarah, buku, guru dan sebagainya, memungkinkan individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik, mana yang terpuji dan yang tidak terpuji. Pada dasarnya segala apa yang mendatangkan manfaat atau mendukung dan menunjang individu untuk berubah kearah lebih

baik, kearah yang positif, dinamis (belajar) atau menuju perkembangan dapat disebut sumber pembelajaran bahkan proses atau aktivitas pengajaran itu sendiri dapat disebut sebagai sumber pembelajaran. sumber pembelajaran dalam pengajaran adalah segala apa (daya, lingkungan, pengalaman) yang dapat digunakan dan dapat mendukung proses atau kegiatan pengajaran secara lebih efektif dan dapat memudahkan pencapaian tujuan pengajaran, tersedia atau sengaja dipersiapkan, baik yang langsung atau tidak langsung, baik yang kongkret atau abstrak, karena sumber pembelajaran menjadi salah satu komponen-komponen pengajaran lainnya.

Menurut uraian di atas maka yang dimaksud dengan pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik melalui proses yang saling mempengaruhi meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, prosedur dan melalui lembaga pendidikan sekolah yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik yaitu warga negara yang dapat berguna bagi masyarakat dan negara.

A.3. Konsep Kecakapan Sosial (*Social Skill*)

Kecakapan sosial merupakan orientasi pendidikan yang mensinergikan mata pelajaran menjadi kecakapan sosial yang diperlukan peserta didik, dimanapun ia berada, untuk meningkatkan mutu hidupnya. Kecakapan sosial antara lain mencakup nilai-nilai sikap sopan santun, keterampilan berkomunikasi, tenggang rasa, kerja sama, kerja keras, sportivitas, disiplin, menghargai orang lain. (Depdiknas, 2003)

Kecakapan sosial merupakan keterampilan yang merupakan cakupan untuk membekali peserta didik dalam bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat yang di dalamnya meliputi bagaimana cara bekerjasama dalam kelompok, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif untuk menjalin kemitraan serta bagaimana menumbuhkan kesadaran diri yang merupakan proses internalisasi dari informasi yang diterima yang pada saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan menjadi perilaku keseharian.

Tujuan pengembangan kecakapan sosial adalah meningkatkan cara berfikir, toleransi, tolong menolong, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, ketekunan, pantang menyerah, semangat membangun, patriotisme, dan bekerja keras. Selain itu juga meningkatkan potensi-potensi peserta didik agar tidak hanya sensitif terhadap permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tetapi juga memiliki mental positif dan dapat memecahkan masalah sehari-hari baik yang menimpa dirinya dan masyarakat. (Enok Maryani,2011:2)

Tujuan pengembangan kecakapan sosial dalam mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik mampu berinteraksi dengan teman-temannya sehingga mampu menyelesaikan tugas bersama, dan hasil yang dicapai akan dirasakan oleh semua. Hal ini selaras dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang sangat dipengaruhi oleh masyarakatnya, baik kepribadian individual, daya rasional, reaksi emosional, aktivitas dan kreativitas dan lain sebagainya dipengaruhi oleh kelompok tempat hidupnya. Selain itu juga tujuan pengembangan kecakapan sosial adalah meningkatkan potensi-potensi peserta didik agar tidak hanya sensitif terhadap permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tetapi juga memiliki mental positif dan dapat memecahkan masalah sehari-hari baik yang menimpa dirinya dan masyarakat. (Sumaatmadja, 1986:29).

Kecakapan sosial memuat aspek-aspek keterampilan untuk hidup dan bekerjasama, keterampilan untuk mengontrol diri dan orang lain, keterampilan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga tercipta suasana yang menyenangkan bagi setiap anggota dari kelompok. (John Jarolimek, 1993:9)

Jadi nilai-nilai kecakapan sosial dalam pembelajaran IPS sangat penting bagi peserta didik, karena berfungsi sebagai acuan tingkah laku terhadap sesamanya, sehingga dapat diterima di masyarakat. Pengembangan nilai-nilai dan kecakapan sosial merupakan hal yang harus dicapai oleh pendidikan menengah pertama. Hal itu karena peserta didik merupakan makhluk sosial yang akan hidup di masyarakat. Pendidikan nilai kecakapan sosial merupakan sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran, karena arus materialisme dan konsumerisme secara global terus mengikis nilai-nilai luhur dari kehidupan manusia tidak saja dikota-kota besar bahkan sudah menyentuh desa-desa yang sangat terpencil sekali, oleh karena itu pendidikan sekarang ini sungguh menghadapi tantangan yang luar biasa berat.

Nilai-nilai kecakapan sosial merupakan sesuatu yang harus ditanamkan kepada anak didik. Langkah-langkah yang harus ditempuh agar pendidikan kecakapan sosial dapat berdaya guna yaitu:

1. Para pendidik terlebih dahulu harus tahu dan memahami dengan hatinya nilai-nilai kecakapan sosial yang akan diajarkan pada setiap materi pembelajaran
2. Para pendidik mentransformasikan nilai-nilai kecakapan sosial kepada peserta didik dengan sentuhan hati dan perasaan melalui contoh-contoh kongkret sedapat mungkin teladan bagi pendidik sehingga peserta didik dapat merasakan alangkah baiknya pendidikan nilai kecakapan sosial

3. Membantu peserta didik untuk menginternalisasikan dengan hati sanubari peserta didik sehingga nilai-nilai kecakapan sosial yang dipahaminya menjadi bagian dari seluruh hidupnya, peserta didik diharapkan merasa memiliki dan menjadikan kecakapan sosial sebagai sifat dan sikap hidupnya
4. Peserta didik yang telah memiliki nilai kecakapan sosial dapat mewujudkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Pembelajaran IPS harus mampu meletakkan nilai-nilai kecakapan sosial bagi peserta didik, Pembelajaran IPS dalam historiografi pendidikan barat masa Hindia Belanda sangat menekankan pada nilai-nilai toleransi, tanggung jawab, demokrasi, rasa ingin tahu, bekerja keras, patriotik, cinta tanah air, keinginan untuk maju, pantang menyerah, bekerja sama, menekankan pada kesamaan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah sama, tenggang rasa atau tepaselira bahwa manusia harus dapat menghargai orang lain, peserta didik harus bisa menghargai perbedaan sikap, perbedaan etnis, menghargai tindakan orang lain yang berbeda dengannya, peserta didik dapat memiliki nilai yaitu semangat kebangsaan, bagaimana peserta didik dapat berpikir, bertindak dan berwawasan yang mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, peserta didik juga diharapkan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, bagaimana sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dari sesuatu yang dipelajarinya, apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, peserta didik juga dituntut untuk memiliki cinta kedamaian agar sikap dan perilaku dan tindakannya akan menyebabkan orang lain merasa senang, dan peserta didik juga dituntut memiliki sikap tanggung jawab yaitu agar mereka mampu melaksanakan tugas yang diembankan kepada dirinya dan dapat

mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, peserta didik juga diharapkan memiliki sikap pantang menyerah.

Prinsip pengembangan keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS di MTs:

1. Nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lingkungan peserta didik dapat dijadikan materi pelajaran secara integrasi
2. Proses belajar mengajar berpusat pada siswa, bahan belajar yang berupa informasi dari guru dijadikan media bagi pengembangan berfikir dan nilai-nilai kecakapan sosial, orientasi bagaimana mengembangkan keterampilan sosial sebagai bekal menjalani kehidupan dalam masyarakat
3. Prinsip mengajar guru di MTs adalah siswa yang lebih aktif serta kehidupan sekolah dan masyarakat dijadikan sumber belajar
4. Evaluasi lebih memfokuskan pada nilai kecakapan sosial dan evaluasi harus lebih menekankan pada proses belajar serta orientasi utama adalah perubahan sikap atau perilaku peserta didik di MTs
5. Budaya belajar IPS di MTs harus berkembang menjadi budaya belajar berfikir dan bukan budaya belajar menghafal
6. Guru IPS di MTs harus inovatif dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya, menghubungkan pendidikan IPS dengan kehidupan sosial budaya sehingga peserta didik mampu lebih dekat dengan lingkungannya. (Suwama Al Muchtar, 2004:216)

Pengembangan kemampuan nilai-nilai kecakapan sosial pendidikan IPS di MTs akan lebih efektif jika dilakukan:

1. Kecakapan sosial dijadikan orientasi pengembangan, maka pendidikan IPS di MTs akan lebih berperan dalam mempersiapkan sumber daya manusia produktif dalam perkembangan ilmu, teknologi dalam era informasi dan globalisasi
2. Pengembangan pendidikan IPS di MTs akan lebih berkualitas apabila dilakukan secara stimulant dengan membina keterlibatan antara guru, ahli pendidikan IPS di IKIP dan LPTK lainnya, para pakar ilmu-ilmu sosial di Universitas, serta tokoh pendidikan dan budayawan Indonesia
3. Proses belajar mengajar akan menjadi lebih berkualitas apabila pendekatan struktural yang selama ini dikembangkan dalam pendidikan IPS di MTs diperkaya dengan pendekatan interdisipliner dengan memasukkan masalah sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dilingkungan peserta didik sebagai bahan kajian dan media stimulus bagi perkembangan kemampuan keterampilan sosial
4. Materi pendidikan IPS akan lebih menarik dan terhindar dari duplikasi yang tidak berarti, dan dari kebiasaan memberikan bahan hapalan manakala pendekatan (1) esensial, (2) kontekstual dan, (3) spiral digunakan untuk pengorganisasian materi pelajaran secara terpadu dalam orientasi pengembangan berpikir
5. Pengembangan kecakapan sosial dalam pendidikan IPS di MTs akan lebih bermakna dalam mencapai tujuan pendidikan nasional apabila pancasila

dan UUD 1945 dijadikan sumber nilai dan acuan dalam pengorganisasian bahan pelajaran yang arah pengembangannya diorientasikan untuk membina nilai-nilai kecakapan bagi pengembangan peserta didik

6. Pengembangan nilai kecakapan sosial dalam pendidikan IPS di MTs akan efektif apabila nilai-nilai kecakapan sosial yang melekat pada setiap konsep bahasan materi pelajaran diajarkan media stimulus bagi terjadinya klarifikasi dan penalaran nilai sosial sebagai proses pengembangan kemampuan menginternalisasikan nilai
7. nilai-nilai yang melekat pada setiap konsep materi IPS di MTs akan dapat diorganisir dijadikan sebagai bahan kajian yang menarik dalam proses belajar, manakala hakekat dari pendidikan IPS khususnya di MTs adalah pendidikan nilai kecakapan sosial yang ditopang oleh wawasan dan performan guru yang didasarkan atas nilai-nilai kecakapan sosial yang kuat dalam orientasi proses memanusiakan manusia

Nilai-nilai kecakapan sosial merupakan sesuatu yang harus ditanamkan kepada anak didik. Langkah-langkah yang harus ditempuh agar pendidikan nilai dapat berdaya guna yaitu: (1) para pendidik terlebih dahulu harus tahu dan jelas dengan akal budinya, memahami dengan hatinya nilai-nilai kecakapan sosial apa saja yang akan diajarkan yang ada disetiap materi pembelajaran, (2) para pendidik mentransformasikan nilai-nilai kecakapan sosial kepada peserta didik dengan sentuhan hati dan perasaan melalui contoh-contoh kongkret sedapat mungkin teladan bagi pendidik sehingga peserta didik dapat merasakan alangkah baiknya pendidikan nilai itu, (3) membantu peserta didik untuk menginternalisasikan

dengan hati sanubari peserta didik sehingga nilai-nilai kecakapan sosial yang dipahaminya menjadi bagian dari seluruh hidupnya, peserta didik diharapkan merasa memiliki dan menjadikan kecakapan sosial sebagai sifat dan sikap hidupnya, (4) peserta didik yang telah memiliki nilai kecakapan sosial dapat mewujudkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Tujuan dan sasaran penyusunan sumber pembelajaran berbasis nilai-nilai kecakapan sosial

Pendidikan berbasis nilai-nilai kecakapan sosial bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai, mengembangkan kecakapan sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri peserta didik serta mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari, dalam berbagai konteks sosial budaya yang berbhineka tunggal eka sepanjang hayat
(Nurul Zuhriah, 2007:64)

Berdasarkan uraian di atas maka sumber pembelajaran berbasis nilai-nilai kecakapan sosial merupakan upaya pembinaan bagi peserta didik agar menjadi orang-orang yang berwatak sekaligus berkepribadian mulia. Watak sekaligus kepribadian diharapkan tercermin lewat sikap dan perilakunya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari.

Pentingnya sumber pembelajaran IPS yang berbasis nilai-nilai kecakapan sosial khususnya di MTs karena kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan-perubahan sosial dan globalisasi yang melahirkan pola kehidupan yang kompetatif, hubungan yang saling mempengaruhi, yang harus dihindari peserta didik adalah hubungan eksploitatif dan hegemoni kelompok

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan, keragaman dan keadilan.

A.4. Fungsi Pendidikan Sejarah di Sekolah

Fungsi utama pendidikan IPS (sejarah) adalah mengembangkan kesadaran nasional sebagai sumber daya mental dalam proses pembangunan kepribadian nasional beserta identitasnya. Struktur kepribadian nasional tersusun dari karakteristik perwatakan yang tumbuh serta melembaga dalam proses pengalaman sepanjang kehidupan bangsa. Dengan demikian, kepribadian nasional serta identitas bertumpu pada pengalaman kolektif bangsa yaitu pada sejarahnya. Tanpa mengetahui sejarahnya, suatu bangsa tidak mungkin mengenal dan memiliki identitasnya. Kesadaran sejarah merupakan inspirasi serta aspirasi, untuk membangkitkan *sense of pride* (kebanggaan) dan *sense of obligation* (tanggung jawab dan kewajiban).

Pendidikan sejarah berkedudukan penting dalam pendidikan nasional sebagai soko guru dalam pembangunan bangsa. Pendidikan sejarah perlu disempurnakan agar dapat berfungsi secara lebih efektif yaitu penyadaran warga negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam rangka pembangunan bangsa pendidikan sejarah berfungsi memberi pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi fakta sejarah dan juga bertujuan menyadarkan anak didik atau membangkitkan kesadaran sejarahnya. Secara umum dapat dinyatakan bahwa identitas dan kepribadian terbentuk oleh pengalaman seseorang dimasa lampau atau riwayat hidupnya. Kehilangan ingatan atau riwayatnya mengakibatkan orang itu kehilangan identitas dan

kepribadiannya. Seperti halnya identitas nasional bahwa “Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya juga kehilangan identitas atau kepribadiannya”.

Pendidikan sejarah mempunyai fungsi strategis dalam pembangunan bangsa. Pendidikan sejarah nasional mampu membangkitkan kesadaran akan pengalaman kolektif bangsa Indonesia beserta segala suka dan dukanya, kemenangan serta kekalahan dalam perjuangan bersama, dan kebersamaan menciptakan solidaritas nasional. Oleh karena itu kesadaran sejarah mampu membangkitkan perasaan tanggung jawab sosial dan moral terhadap segala kegiatan pembangunan bangsa.

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau dan menyangkut manusia sebagai makhluk sosial, dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kebijaksanaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam mempelajari sejarah, banyak sekali manfaat dan kegunaannya, menurut Nugroho Notosusanto, manfaat dan guna sejarah ada tiga yaitu:

1. Memberi pelajaran (*edukatif*), belajar dari pengalaman-pengalaman dimasa lampau yang dapat dijadikan pelajaran sehingga hal-hal yang buruk dapat dihindari.
2. Memberi ilham (*Inspiratif*), bahwa tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa dimasa lampau dapat mengilhami, pada taraf perjuangan yang sekarang. Peristiwa-peristiwa yang benar akan memberi ilham yang benar pula.
3. Memberi kesenangan (*rekreatif*), kisah yang baik oleh sebuah roman yang bagus dengan sedihnya dan berhasil mengangkat seni. (Nugroho Notosusanto, 1964:17).

Selanjutnya Nugroho Notosusanto mengemukakan bahwa dengan mempelajari sejarah manusia akan menjadi bijaksana dalam bertindak untuk berbuat sesuatu, sekarang dan pada masa yang akan datang dengan berlandaskan masa lampau. (Nugroho Notosusanto, 1964:17).

Sejarah atau historis merupakan peristiwa yang berhubungan dengan masa lampau yang benar-benar terjadi dan kebenaran sejarah itu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk dapat mempelajari apa yang terjadi pada masa lampau, memahami dan mengetahui kebenaran dari sejarah tersebut melalui studi pustaka, arsip-arsip bersejarah maupun peninggalan-peninggalan bersejarah.

Menurut Mohammad Yamin dalam buku karangan Husin Sayuti, Sejarah adalah Ilmu pengetahuan pada umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarich tentang kejadian dalam masyarakat pada waktu yang lampau sebagai hasil penyelidikan bahan-bahan atau tanda-tanda yang lain. (Husin Sayuti, 1984; 97).

Sejarah adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang meneliti secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dimasa lampau beserta kejadiannya dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikan pedoman bagi penelitian dan penentuan keadaan sekarang serta mengarah pada proses masa depan. (Mohammad Ali, 1987:30)

Dari pendapat-pendapat di atas, maka sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau dan menyangkut

manusia sebagai makhluk sosial, dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kebijaksanaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

A.5. Pendidikan Sejarah dalam Lingkup IPS

Sistem pendidikan nasional diteruskan setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Praktik pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Dari pendekatan "*Macrocsmics*", bisa dianalisis bahwa praktik pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan lainnya.

Untuk menghadapi masa depan perlu disiapkan generasi di tingkat sekolah yang memiliki pengetahuan sosial, nilai-nilai kecakapan sosial agar peserta didik mampu bertahan hidup dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi dirinya. Untuk membangun generasi muda yang peka terhadap masalah sosial dalam kehidupannya maka dibutuhkan program pendidikan yang tidak hanya membekali pengetahuan secara keilmuan, tetapi juga pemaknaan dan aplikasinya atas pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Menyiapkan generasi muda yang berkarakter dan memiliki kepekaan sosial dengan membekali pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam rangka mengambil keputusan. Pendidikan tentang masalah sosial dalam kehidupan manusia di

tingkat sekolah dilakukan melalui program pendidikan IPS (*social studies*). Melalui pendidikan IPS disekolah diharapkan dapat membekali pengetahuan dan wawasan tentang konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial dilingkungannya serta mampu memecahkan masalah sosial dengan baik. (Pargito, 2010:40)

Pendidikan IPS (*social studies*) merupakan program pendidikan yang materinya bersumber dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Menurut Norma Mackenzie (1975) yang dikutip oleh Pargito, Ilmu Sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya atau dengan kata lain adalah semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat.

Bidang ilmu yang termasuk dalam ilmu sosial adalah: (1) sosiologi adalah ilmu yang berkenaan dengan aspek hubungan antar manusia dalam kelompok, (2) psikologi sosial adalah ilmu yang berkenaan dengan aspek kejiwaan manusia sebagai anggota masyarakat, (3) ilmu hukum adalah ilmu yang berkenaan dengan aspek norma, peraturan dan hukum, (4) ilmu politik adalah ilmu berkenaan dengan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, (5) ilmu pemerintahan, ilmu yang berkenaan dengan aspek pemerintahan dan kenegaraan, (6) antropologi budaya, ilmu yang berkenaan dengan aspek kebudayaan, (7) ilmu Sejarah, ilmu yang berkenaan dengan waktu, peristiwa dan ruang aspek kesejarahan, (8) geografi, ilmu yang berkenaan dengan keruangan antara faktor manusia dengan faktor alam dan lingkungan, (9) ilmu ekonomi, ilmu yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan kelangkaan, (10) ilmu pendidikan adalah ilmu yang merubah perilaku kearah lebih baik.

Ilmu pengetahuan sosial sebagai transmisi kewarganegaraan (*Sosial studies as citizenship transmission*) dalam hakekat IPS merupakan program pendidikan

pelestarian kebudayaan suatu bangsa sudah ada sejak adanya manusia itu sendiri. Dalam berbagai literatur program pendidikan transmisi kewarganegaraan dilaksanakan dengan memberikan contoh-contoh dan pemakaian cerita yang disusun untuk mengajarkan kebijakan, cita-cita luhur suatu bangsa dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran IPS tidak hanya menjelaskan fakta, peristiwa secara kronologis, logis dan ilmiah tetapi pewarisan nilai-nilai kecakapan sosial kepada peserta didik.

Tujuan yang hendak dicapai dari *citizenship transmission* adalah sebagai berikut: (1) pengembangan pengertian patriotism, (2) pengembangan pengertian dasar dan apresiasi terhadap nilai-nilai bangsa, lembaga, dan praktik, (3) memberi inspirasi pada integrasi pribadi dan tanggung jawab warga negara, (4) membentuk pengertian dan apresiasi terhadap nenek moyang bangsa, (5) mendorong partisipasi demokrasi aktif, (6) membantu murid-murid mendapatkan kesadaran akan problema-problema social, (7) pengembangan cita-cita yang diinginkan, sikap, keterampilan bertingkah laku yang sangat diperlukan dalam berhubungan baik dengan yang lain.

Tujuan instruksional *citizenship transmission* tentang usaha menyiapkan warga negara yang baik adalah pengetahuan dan apresiasi terhadap nenek moyangnya. Seperti tentang sejarah yang paling penting disusun secara kronologis dan yang sudah disyahkan oleh pemerintah.

A.6. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah

Menurut Sartono Kartodirdjo, sejak akhir perang dunia II perkembangan ilmu sejarah menunjukkan kecenderungan kuat untuk menggunakan pendekatan ilmu sosial, proses saling mendekati antara ilmu sejarah dan ilmu sosial disebabkan beberapa hal:

1. Sejarah deskriptif naratif sudah tidak memuaskan lagi untuk menjelaskan berbagai masalah atau gejala yang serba kompleks, maka konsekuensi logis adalah pendekatan yang mampu mengungkapkannya.
2. Pendekatan multidimensional atau *Scsial Scientific* adalah pendekatan yang paling tepat digunakan menyelesaikan permasalahan.
3. Perkembangan ilmu sosial yang pesat mampu menyediakan teori dan konsep yang merupakan alat analisis yang relevan untuk keperluan analisis historis.
4. Pendidikan sejarah tidak hanya terbatas pada pengkajian hal-hal informatif tentang apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana, tetapi melacak berbagai struktur masyarakat, pola kelakuan, kecenderungan proses dalam berbagai bidang. Kesemuanya ini menuntut adanya alat analisis yang tajam, serta mampu mengekstrapolasikan fakta, unsur dan pola.

Ilmu sejarah mendapat pengaruh besar dari kemajuan pesat ilmu sosial, antara lain perspektivisme yang menonjol sehingga terasa perlu mengadakan perubahan metodologi yang lebih canggih dan produktif.

Metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu sosial mempunyai relevansi yang bertolak dari konsep sejarah sebagai sistem, konsep sistem mencakup prinsip sebagai berikut:

1. Suatu sistem terdiri dari unsur atau aspek yang merupakan kesatuan.
2. Fungsi unsur saling mempengaruhi, saling ketergantungan dikarenakan setiap unsur memiliki dimensi unsur lain dan bersama-sama mendukung fungsi sistem.
3. Mendefinisikan unsur serta saling pengaruh tidak ada satu faktor yang *deterministic*
4. Pendekatan sistem yang sinkronis sifatnya perlu diimbangi oleh pendekatan diakronis.

Perubahan metodologi sejarah konvensional sangat revolusioner. Meninggalkan model penulisan sejarah naratif, yang sangat penting adalah dengan metodologi baru ilmu sejarah bergeser ke arah ilmu sosial. Keuntungan dari pendekatan ilmu sosial adalah menyoroti multiperspektivitas atau multidimensionalitas.

Pendekatan studi sejarah dengan menggunakan metodologi baru seperti pendekatan ilmu sosial akan memperluas daerah pengkajiannya. Melakukan penyorotan aspek atau dimensi dari berbagai gejala sejarah, pada umumnya segi prosedural yang menjadi fokus perhatian sejarawan dengan pendekatan ilmu sosial dapat digarap aspek strukturalnya, dan aspek prosedural hanya dapat dimengerti bila dikaitkan dengan aspek strukturalnya bahkan proses hanya dapat berjalan dalam kerangka struktural, misalnya pola atau kebiasaan yang mantap menimbulkan suatu kelembagaan seperti: adat istiadat, etika dan upacara. Kelakuan manusia dalam masyarakat selalu distrukturalisasikan sesuai tradisi atau konvensi. Struktur kelakuan yang mantap melatarbelakangi tindakan atau kelakuan tertentu seseorang, bila tidak ada struktur yang melandasinya maka tindakan itu

sukar diramalkan atau ditafsirkan oleh sesamanya sehingga timbul kekalutan sosial atau suatu keadaan yang tidak memungkinkan kehidupan bersama secara teratur dan beradab.

A.7. Konsep Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penyelenggaraan pendidikan adalah suatu kesatuan dari pendidikan yang terorganisir yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan yang diinginkan (IL Pasaribu, 1982;1).

Penyelenggaraan pendidikan adalah dimana pendidikan yang telah direncanakan secara terorganisir untuk mencapai sebuah pendidikan yang diinginkan yang disampaikan pada orang yang membutuhkan pendidikan tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan adalah suatu kesatuan pendidikan yang dilaksanakan secara sadar dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan yang berlangsung di dalam dan di luar sekolah, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan

dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang (Mudyaharjo, 2008:3).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan sehingga kelak peserta didik dapat berperan dalam masyarakat.

A.8. Konsep Penyelenggaraan Pendidikan Barat Masa Hindia Belanda

Munculnya sistem pendidikan kolonial ketika itu tidaklah berbanding lurus dengan kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Orientasi hasil pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga murah bagi Hindia-Belanda.

Tujuan mendirikan lembaga pendidikan oleh Belanda bukan untuk kepentingan orang Indonesia, tetapi sesungguhnya adalah untuk kepentingan mereka yaitu untuk mengisi jabatan rendah dalam pemerinthaan dan untuk mengisi tenaga pada perusahaan swasta Belanda. Belanda mengeluarkan peraturan bahwa yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah maupun kepala daerah setempat harus memenuhi syarat pendidikan menurut ukuran barat.

Landasan ideal pendidikan pada zaman Hindia-Belanda: (1) pemerintah berusaha untuk tidak memihak kepada salah satu agama, (2) pendidikan tidak diusahakan untuk dapat hidup selaras dengan lingkungan, tetapi supaya anak didik kelak

kemudian hari dapat mencari pekerjaan atau penghidupan demi untuk kepentingan pemerintah, (3) sistem persekolahan disusun menurut perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya dipulau Jawa, (4) pada umumnya pendidikan diarahkan untuk membentuk suatu golongan elite sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia.

Menurut Gunawan. Tujuan diselenggarakannya pendidikan untuk masyarakat bumiputera adalah mendapat kesempatan memperoleh pendidikan barat, untuk pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Selain itu juga dimaksudkan dengan pendidikan barat lambat laun dapat mengurangi semangat patriotisme, gotong royong dan berdikari. (Gunawan, 1995:19).

Tujuan utama Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan terhadap golongan bumiputera adalah untuk mendapatkan tenaga terdidik dengan biaya murah. Untuk kepentingan tersebut Belanda kemudian mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi. (www.g-Excess.com/1d/sejarah pengaruh perkembangan pendidikan barat di Indonesia, 26 maret 2011).

Van den Bosch selaku Gubernur Jendral Hindia Belanda mengatakan bahwa tanpa bantuan penduduk bumiputera yang terdidik, maka pembangunan ekonomi di Hindia Belanda yang menjadi tugas utama Van den Bosch tidak akan berhasil. Untuk tujuan tersebut, maka dibukalah pendidikan untuk golongan bumiputera, agar pelaksanaan tanam paksa (*Cultuurstelsel*) mendatangkan keuntungan besar sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi negeri Belanda.

Pendidikan untuk golongan bumiputera dilaksanakan melalui sekolah, mulai sekolah dasar sampai dengan sekolah/ perguruan tinggi. tetapi ada beberapa

hambatan masuk sekolah seperti: (1) adanya perbedaan warna kulit (*color line division*), (2) sistem pendidikan yang dikembangkan disesuaikan dengan status sosial masyarakat (Eropa, Timur Asing, atau Bumiputera), (3) bagi kelompok bumiputera masih dibedakan oleh status keturunan (bangsawan, priyayi, rakyat jelata).

Pada tahun 1892 terjadi reorganisasi pada penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan pada keputusan raja tanggal 28 september 1892, Penyelenggaraan sekolah dasar bumiputera dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse School*)

Sekolah ini didirikan di ibukota keresidenan, kabupaten, kewedanan atau yang sederajat, ditempat-tempat yang dipandang perlu untuk memiliki sekolah ini. Murid-murid yang diterima adalah anak-anak golongan masyarakat atas, seperti anak-anak bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, dan orang-orang bumiputera yang terhormat. Sekolah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan dan perusahaan.

2. Sekolah Kelas Dua (*Twede Klasse School*).

Sekolah ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat umum. Sekolah ini disediakan bagi anak-anak bumiputera dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah. Perbedaan antara sekolah kelas satu dengan sekolah kelas dua terletak pada lama belajar, kurikulum, tenaga pengajar, dan uang sekolah. Lama belajar pada sekolah kelas dua adalah 5 tahun. Sekolah ini didirikan di distrik-distrik atau kewedanan-kewedanan sehingga disebut juga sekolah distrik.

Berdasarkan uraian di atas, jadi yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan barat adalah keputusan atau wewenang Belanda dalam pelaksanaan politik pendidikan pada masyarakat bumiputera yang penyelenggaraan pendidikannya tidak terlepas dari komponen jaringan kerja yang saling berhubungan dalam menanamkan pengetahuan, kecakapan kepada masyarakat bumiputera di bidang-bidang ilmu tertentu yang berhubungan dengan kepentingan mereka.

Pelaksanaan pendidikan bagi rakyat bumiputera yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda, menurut S.Nasution, mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut:

a. Prinsip *Gradualisme*

Gradualisme memiliki makna perkembangan yang berangsur-angsur, lambat dan bertahap. Pemerintah kolonial Belanda sengaja menerapkan prinsip gradualisme dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak bumiputera. Beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan penerapan gradualisme pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan bagi jutaan masyarakat bumiputera akan memakan biaya yang besar
2. Menjaga agar anak bumiputera tidak dapat mengalahkan kemajuan anak Belanda
3. Memperlambat serta menghambat gerak maju intelektual agar tidak segera menjadi ancaman bagi kedudukan pemerintah Hindia-Belanda.

b. Sistem *Dualisme*

merupakan dua kondisi yang satu sama lain saling bertentangan. Sistem dualisme pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial tampak pada penyediaan sekolah yang berbeda golongan rasial dan sosial. Sekolah Belanda dan sekolah pribumi mempunyai perbedaan inspeksi, kurikulum, bahasa pengantar, biaya dan sarana prasarana. Diskriminasi dalam pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mempertahankan kedudukan Belanda sebagai penjajah dan masyarakat bumiputera sebagai terjajah.
2. Menumbuhkan bibit-bibit pertentangan diantara penduduk bumiputera kaya dan penduduk bumiputera yang miskin demi mendukung politik *Divide et Impera*.

c. Keterbatasan Tujuan

Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat bumiputera memiliki keterbatasan tujuan, yakni menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang terampil dan murah. Para pegawai tersebut akan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan pegawai administrasi diperkebunan-perkebunan pemerintah kolonial yang amat luas atau perusahaan-perusahaan swasta yang menjalin kerja sama dengan pemerintah.

d. Prinsip *Konkordansi*

Pelaksanaan prinsip konkordansi ditujukan agar penyelenggaraan pendidikan di Hindia-Belanda mempunyai kurikulum dan standar pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah di negeri Belanda. Apabila terjadi mutasi peserta didik dari Hindia-Belanda kesekolah-sekolah di negeri Belanda, maka peserta didik yang bersangkutan tidak akan mengalami kesulitan penyesuaian diri.

e. Tidak ada perencanaan pendidikan yang sistematis

Belanda berhasil mendirikan bermacam jenis dan jenjang pendidikan, namun ciri khas sekolah-sekolah yang didirikan Belanda itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tanpa hubungan organis antara satu dan yang lain, serta tanpa jalan untuk melanjutkannya. Sebaliknya sistem pendidikan untuk anak-anak Belanda mempunyai organisasi yang lengkap sama dengan di negeri Belanda.

Implementasi kebijakan pendidikan Belanda di atas selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggolongkan stratifikasi masyarakat sesuai keturunan atau status sosial
2. Pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu
3. Anak-anak diciptakan untuk dapat mencari pekerjaan demi kepentingan kolonial
4. Sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat bumiputera
5. Pembukaan sekolah-sekolah didasarkan akan kebutuhan pemerintah kolonial atau pengusaha, bukan kebutuhan pribumi.

Dari adanya pernyataan tersebut, terlihat adanya tujuan kolonial dalam bidang pendidikan, yaitu ingin menciptakan tenaga-tenaga teknik yang langsung dengan kebutuhan primer mereka. Sungguh tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh kebijakan Belanda tentang penyelenggaraan pendidikan lebih didasarkan pada kepentingan sosial politik dan ekonomi.

Penyelenggaraan pendidikan barat pada masa kolonial pemerintah Belanda tahun 1892 - 1920 adalah suatu komponen yang saling berhubungan dan saling

mempengaruhi. Penyelenggaraan pendidikan melalui penanaman pengetahuan, kecakapan, kepada masyarakat bumiputera pada bidang-bidang ilmu tertentu demi kepentingan pemerintah Belanda. Kurikulum pendidikan disesuaikan dengan keperluan pemerintah Belanda. Sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan yang utama adalah senantiasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pendidikan barat bagi masyarakat bumiputera memiliki komponen-komponen seperti: kurikulum, guru, dan jenis pendidikan.

1. Kurikulum

Peraturan tentang kurikulum 1893 terdiri atas mata pelajaran, (1) IPS yang terdiri dari ilmu bumi Indonesia/geografi dan sejarah pulau tempat tinggal dalam mata pelajaran ini peserta didik diharapkan bisa hidup bermasyarakat dengan seimbang baik dengan alam atau dengan manusia, (2) mengukur tanah, ini dihubungkan dengan pelaksanaan tanam paksa, pada waktu menetapkan luas sawah masing-masing, yang harus ditanami dengan tanaman untuk pemerintah, (3) menggambar: anak-anak banyak diberi latihan menggambar peta-peta lapangan, (4) berhitung/matematika; soal-soal yang berhubungan dengan pemungutan pajak tanah, administrasi gudang-gudang garam dan kopi, membuat macam-macam daftar, tata buku yang sederhana, (5) ilmu pertanian: tujuannya bukan untuk memajukan pertanian rakyat, tetapi hanya untuk memenuhi pengetahuan yang berguna bagi calon pegawai, (6) membaca dan menulis: bahasa daerah diberikan dikelas 1-3, bahasa latin.diberikan dikelas 2, bahasa melayu diberikan dikelas 4, mulai tahun 1907 bahasa Belanda dimasukkan kedalam program kelas satu dan diajarkan dimulai kelas 3.

2. Guru

Guru merupakan masalah yang penting sebagai staf pengajar yang tugasnya adalah mendidik para murid, oleh karena itu Belanda membentuk sekolah guru untuk menghasilkan guru dalam mendidik anak-anak bumiputera.

Sekolah guru dengan bahasa pengantar bahasa Belanda

1. *Kweekschool*, diselenggarakan selama 4 tahun, guru lulusan sekolah ini memiliki wewenang dengan gaji yang tinggi, mendapat gelar resmi mantra guru dan tentunya memberi mereka kedudukan yang dihormati dan dihargai dikalangan pegawai pemerintah dan masyarakat.
2. *Hogere Kweekschool*, Diselenggarakan selama 6 tahun, guru lulusan ini disebut guru bantu, memiliki wewenang sebagai pengajar dan memiliki gaji lebih rendah dibandingkan guru lulusan *Kweekschool*
3. *Hollandsch Inlandsch Kweekschool*, diselenggarakan selama 6 tahun, disebut juga guru bantu karena diterima melalui ujian guru bantu.
4. *Normaal school*, lulusan sekolah ini juga dapat digolongkan menjadi calon guru
5. *Cursus Volksenderwijzer (CVO)*, Lulusan ini digolongkan sebagai guru yang diangkat secara darurat, memiliki gaji yang lebih kecil dengan mengajar sekolah bumiputera tingkat rendah seperti sekolah desa. (Sartono Kartodirjo, 1993;80)

1. Jenis Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada masa kolonial pemerintah Belanda tahun 1892 - 1920 mengarah akan kebutuhan tenaga-tenaga murah telah mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah yang berjenjang, seperti:

A. Pendidikan Rendah

Pendidikan rendah terdiri atas sekolah-sekolah yang berbeda bahasa pengantarnya, yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah.

a. Sekolah Rendah Dengan Bahasa Pengantar Bahasa Belanda

Ada dua jenis sekolah rendah yang menggunakan pengantar bahasa Belanda

1. *Europesche lagere school (ELS)* atau sekolah rendah Eropa diperuntukkan bagi keturunan Eropa, keturunan timur asing, atau bumiputera dari tokoh terkemuka, dengan lama sekolah tujuh tahun.
2. *Eerste Klasse School* atau sekolah kelas satu diperuntukkan bagi penduduk selain Eropa. Sekolah rendah ini terdiri atas dua jenis sekolah berdasarkan kelompok sasarannya, yaitu:
 - a. *Hollandsch-Chineesche School (HCS)* atau sekolah Cina-Belanda, diperuntukkan bagi penduduk keturunan timur asing, khususnya keturunan Cina. HCS yang pertama didirikan pada tahun 1908 dengan lama belajar tujuh tahun.

- b. *Hollandsch Inlandsche School (HIS)* atau sekolah Bumiputera-Belanda untuk golongan penduduk keturunan bumiputera yang umumnya anak bangsawan, tokoh terkemuka, atau pegawai negeri, lama belajar tujuh tahun.
- b. Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah, jenis sekolah rendah ini terdiri dari empat macam, yaitu:
 - a. *Twede Klasse School* atau sekolah kelas dua, disediakan untuk golongan bumiputera dengan lama belajar lima tahun
 - b. *Volksschool* atau sekolah desa yang disediakan untuk anak-anak golongan bumiputera dengan lama belajar tiga tahun.
 - c. *Vervolgschool* atau sekolah sambungan, yaitu sebagai kelanjutan dari sekolah desa untuk golongan bumiputera dengan lama belajar dua tahun.
 - d. *Schakelschool* atau sekolah peralihan, yaitu sekolah peralihan dari sekolah desa ke sekolah dasar dengan lama belajar lima tahun dan diperuntukkan bagi golongan bumiputera, lulusan sekolah peralihan dapat melanjutkan ke MULO.

A. Pendidikan Menengah

Jenis pendidikan menengah lanjutan diantaranya sebagai berikut:

- a. *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)* atau pendidikan rendah yang dipeluas merupakan kelanjutan dari sekolah rendah yang menggunakan pengantar bahasa Belanda dengan lama belajar tiga sampai empat tahun. MULO setingkat dengan SMP.

- b. *Algemeene middelbare School (AMS)* sekolah menengah atas merupakan kelanjutan MULO berbahasa Belanda dan diperuntukkan bagi golongan pribumi dan timur asing. Lama belajar tiga sampai empat tahun. AMS terdiri dari tiga jurusan, yaitu A1, jurusan sastra timur, A2 jurusan klasik barat, dan B jurusan pengetahuan alam
- c. *Burger School (HBS)* merupakan sekolah menengah atas merupakan kelanjutan dari ELS yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan golongan bumiputera, atau tokoh terkemuka. Sekolah ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda dan pendidikannya berorientasi barat, lama belajar tiga tahun. Jenis sekolah ini disebut pula Gymnasium Ada pula HBS yang menyelenggarakan pendidikan selama lima tahun,
- d. *Opleiding School voor Indische Ambtenaren (OSVIA)* atau sekolah menengah atas merupakan sekolah pendidikan pegawai bumiputera, berdiri tahun 1900 dengan lama belajar lima tahun dan menerima lulusan ELS. Pada tahun 1927 OSVIA ditingkatkan setarap SMU menjadi *Middelbaar Opleiding School Voor Indische Ambtenaren (MOSVIA)* dengan lama belajar tiga tahun dan menerima lulusan MULO.
- e. *School tot Opleiding van Inlandse Artsen (STOVIA)* atau sekolah menengah atas untuk mendidik dokter bumiputera yang didirikan di Jakarta pada tahun 1902 dengan lama belajar tujuh tahun. Sekolah ini semula menerima lulusan ELS, kemudian ditingkatkan menerima lulusan MULO.

B. Pendidikan Menengah Kejuruan

Pendidikan menengah kejuruan didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan pertukangan, teknik, dagang, pertanian dan kewanitaan. Jenis-jenis sekolah kejuruan antara lain sebagai berikut:

- a. *Ambaschts Leergang* adalah sekolah teknik menengah pertukangan dengan pengantar bahasa daerah. Sekolah ini menerima lulusan *Twede Klasse School dan Vervolbschool*. Selama dua tahun pertama diberikan pengetahuan mengenai perkayuan dan besi. Tahun-tahun berikutnya diberi tambahan pengetahuan dan keterampilan, seperti montir mobil, listrik, mebel, atau pertukangan.
- b. *Ambachtsschool* adalah sekolah teknik menengah pertukangan dengan pengantar bahasa Belanda. Sekolah ini menerima lulusan HIS, HCS, dan *Schakelschool*. Sekolah ini bertujuan mencetak mandor dengan keahlian, antara lain montir mobil, mesin, listrik, kayu. Lama pendidikan tiga tahun.
- c. *Tehnisch Onderwijs* atau sekolah teknik menengah adalah lembaga pendidikan lanjutan bagi *Ambachtsschool* dengan lama belajar tiga tahun
- d. *Handles Onderwijs* atau sekolah menengah ekonomi atas adalah jenis sekolah ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan Eropa, dengan lama pendidikan tiga tahun.
- e. *Landbouw Onderwijs* atau pendidikan pertanian merupakan sekolah yang bertujuan memenuhi keperluan penduduk agraris dan perusahaan perkebunan Eropa, dengan lama pendidikan tiga tahun.
- f. *Meisjes Vakonderwijs* atau pendidikan kejuruan kewanitaan dengan lama belajar sekitar tiga tahun.

C. Pendidikan Tinggi

Pada dasawarsa kedua abad ke-20 mulai didirikan pendidikan tinggi bagi masyarakat bumiputera, beberapa pendidikan tinggi terkenal yaitu:

1. *Rechtskundigen Hooge School (RHS)* atau Sekolah Tinggi Hukum menerima lulusan AMS dan HBS, dengan lama belajar lima tahun.
2. *Tehnische Hooge School (THS)* atau Sekolah Tinggi Teknik, merupakan lembaga pendidikan tinggi teknik yang didirikan di Bandung Pada tahun 1920. Lembaga pendidikan ini sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah pendidikan barat masa Hindia Belanda, erat kaitannya dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial. Perlu ditekankan kepada pendidik yang berorientasi kepada kisah sejarah kependidikan harus mengetahui essensi dari pendidikan secara komprhehensip sebagai proses psikomotoriknya terproses dan terlaksana dengan sebagaimana yang diharapkan ketika peserta didik sedang dalam teritorial proses penyampaian kebudayaan yang dilakukan oleh pendidik dan esensi itu adalah: “essensi dari pendidikan itu sebenarnya ialah pengalihan (transmisi) kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide dan nilai-nilai kecakapan sosial serta estetika) dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa. Oleh sebab itu sejarah pendidikan mempunyai sejarah yang sama tuanya dengan masyarakat pelakunya sendiri, sejak dari pendidikan informal dalam keluarga batih, sampai kepada pendidikan formal dan non formal dalam masyarakat agraris maupun industry”.

Fungsi konteks objektifitasnya adalah hubungannya yang berguna sebagai mensukseskan sistem pendidikan hari ini dan selanjutnya karena jika kita belajar sejarah, Sejarah sebagai kajian reflektif dapat dimanfaatkan untuk melihat prospek kedepan karena mempunyai potensi meramal yaitu saintifikasi. Dalam setiap bahasan dilihat filosofi yang melatarbelakanginya jadi kisah sejarah pendidikan barat masa Hindia Belanda sebagai alasan untuk keberhasilan sistem pendidikan yang akan diterapkan hari ini dan selanjutnya, dan bagi sejarawan pendidikan harus melihat hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat (pendidik dan peserta didik), antara penyelenggara pendidikan dengan pemerintah sebagai representasi bangsa dan negara yang merumuskan kebijakan umum bagi pendidikan nasional dan produk dari pendidikan menimbulkan mobilitas sosial (vertikal maupun horizontal), masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan yang dampak-dampaknya (positif maupun negatif) dirasakan terutama oleh masyarakat, misalnya timbulnya golongan menengah yang menganggur karena jenis pendidikan tidak sesuai dengan pasar kerja, atau kesenjangan dalam pemerataan dan mutu pendidikan, pendidikan lanjutan yang hanya dapat dinikmati oleh anak-anak orang kaya dengan pendidikan terminal dari anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, komersialisasi pendidikan dalam bentuk yayasan-yayasan dan sebagainya. Semuanya menuntut peningkatan karena hasil pembelajaran IPS di MTs khususnya kisah sejarah pendidikan barat haruslah menghasilkan pendidikan yang lebih baik dari pada sebelumnya, untuk menangani semua masalah kependidikan ini jangan lupa pendidikan merupakan salah satu sektor suksesnya sistem demokrasi, maka pewariskan nilai-nilai kecakapan sosial

penting sekali guna mensukseskan sistem pendidikan dan demokrasi hari ini dan selanjutnya

B. Kerangka Pikir

Kehidupan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dilihat dari keruangan atau tempat tinggal maupun konteks waktu. Berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat harus dapat ditangkap oleh lembaga pendidikan yang kemudian menjadi sumber bahan materi pembelajaran. Sumber bahan pelajaran secara formal dapat dituangkan dalam bentuk kurikulum yang memiliki landasan filosofis yang jelas. Landasan filosofis yang digunakan hendaknya melihat kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Kondisi masyarakat yang terjadi saat ini adalah masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh adanya interaksi sosial baik antar individu atau kelompok yang melahirkan globalisasi

Peserta didik yang belajar sejarah dengan benar akan menemukan konsep perjalanan sejarah masyarakat dan bangsanya. Melalui belajar sejarah peserta didik akan mengetahui bahwa setiap peristiwa sejarah akan berkaitan dengan peristiwa sejarah lainnya pada suatu kurun waktu tertentu, antar peristiwa lokal, nasional, regional maupun internasional. Peserta didik akan menemukan bahwa setiap peristiwa sejarah bukanlah suatu kejadian yang berdimensi satu, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai kekuatan sosial, politik, ekonomi, kultur, dan geografis.

Sejarah sebagai bidang pengetahuan yang memuat pengetahuan tentang berbagai peristiwa masa lampau dalam perjuangan suatu bangsa dapat merupakan sumber pelajaran mengenai berbagai peristiwa yang mencerminkan berbagai nilai kecakapan sosial seperti terlihat dalam tekad, tindakan dan perjuangan para pendahulu kita pada berbagai waktu sejarah.

Kisah sejarah penyelenggaraan pendidikan barat kepada masyarakat bumiputera oleh pemerintah Hindia-Belanda, khususnya tahun 1890-1920 yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi dan tenaga-tenaga yang murah serta terampil guna ditempatkan di perkebunan-perkebunan pemerintah kolonial atau perusahaan-perusahaan asing lainnya sebagai pekerja kelas dua atau buruh dengan harga murah

Penyelenggaraan pendidikan barat yang diberikan oleh pemerintahan kolonial Belanda memiliki tujuan yang pencapaiannya diusahakan secara nyata melalui tindakan pengajaran yang berbentuk pengetahuan dan keterampilan yang bersifat materialistis dan diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan ditekankan hanya untuk kepentingan penjajah dari pada rakyat jajahannya. Dasar pendidikannya adalah dasar pendidikan barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan barat.

Materi sejarah pendidikan barat sebagai salah satu bagian pembelajaran IPS tentu memerlukan aplikasi yang berorientasi pada penanaman nilai. Mengingat pemahaman nilai sejarah sangat esensial sebagai bahan pendidikan dalam rangka membentuk warga negara yang ideal. Aplikasi pembelajaran nilai sejarah perlu menekankan pada masalah yang relevan dengan persoalan sosial yang aktual dan perkembangan masyarakat pada masa kini. Dengan begitu dapat membantu

meningkatkan pemahaman secara kritis peristiwa, gagasan, fenomena kesejarahan sesuai dengan keterampilan berpikir kritis sejarah (*historical thinking*). Salah satu kecakapan sosial yang perlu dikembangkan adalah kepekaan sosial dalam bentuk lahirnya empati peserta didik terhadap nilai yang berkembang dalam masyarakat sekitarnya. Maka belajar sejarah dapat dikatakan sebagai sumber penting belajar nilai kecakapan sosial.

Pentingnya pembelajaran berbasis nilai-nilai kecakapan sosial, didorong realita saat ini yang menunjukkan gejala-gejala makin terkikisnya nilai-nilai kecakapan sosial dikalangan anak muda seperti melemahnya nasionalisme, maraknya penyimpangan sosial, tawuran, korupsi, disintegrasi bangsa, ketidakramahan terhadap lingkungan, individualisme, krisis kepercayaan, merupakan fakta disebabkan lemahnya kecakapan sosial, pengembangan kecakapan sosial merupakan tugas utama pembelajaran IPS. (Enok Maryani, 2011:1).

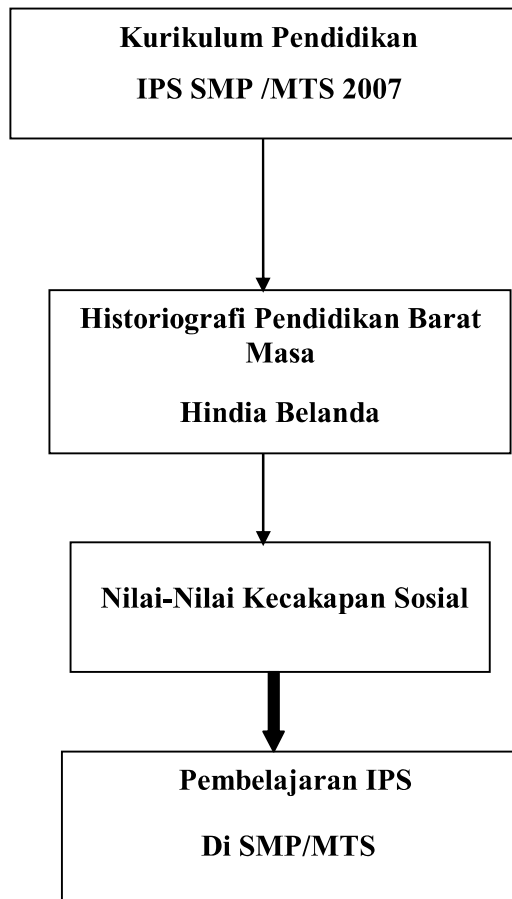
Manfaat pembelajaran IPS adalah penanaman dan pembentukan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. (Bank, 1993:42).

Dengan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial diharapkan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- ✓ Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya
- ✓ Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiri, mampu memecahkan masalah, dan terampil dalam kehidupan sosial.
- ✓ Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kecakapan sosial dan kemanusiaan
- ✓ Memiliki kemampuan berkomunikasi, berkerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional maupun global. (Pargito, 2010:43)

Pembelajaran IPS dengan demikian memiliki arti penting dalam mengembangkan kecakapan sosial seperti: meningkatkan cara berpikir, toleransi, tolong menolong, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, ketekunan, pantang menyerah, semangat membangun, patriotisme, dan bekerja keras. Selain itu IPS juga meningkatkan potensi-potensi siswa agar tidak hanya sensitif terhadap permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tetapi juga memiliki mental positif dan dapat memecahkan masalah sehari-hari baik yang menimpa dirinya dan masyarakat. (Enok Maryani, 2011:2)

C. Paradigma



Keterangan:

→ : Relevansi

➔ : Tujuan